

Perumusan Masalah Kebijakan, Alternatif Kebijakan, dan Rekomendasi Kebijakan dalam Mempengaruhi Perkembangan Kurikulum Pendidikan

Puji Ambarwati^{1*}, Nanang Fathurrohman², Anis Fauzi³
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia
Email: 232625124.puji@uinbanten.ac.id

Abstrak

Kurikulum merupakan elemen sentral dalam sistem pendidikan yang berperan penting dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Kurikulum yang berkualitas dan relevan menjadi kunci untuk menghasilkan generasi muda yang kompeten dan mampu menjawab tantangan masa depan. Dalam konteks global yang terus berkembang, dinamika perubahan dan tuntutan terhadap sistem pendidikan semakin kompleks. Hal ini mendorong perlunya dilakukan penyesuaian dan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan. Pengembangan kurikulum yang efektif tidak dapat dilakukan secara terpisah dari kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang tepat menjadi landasan bagi perumusan kurikulum yang berkualitas dan berorientasi pada masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan dan memperkaya pemahaman tentang sistematika perumusan masalah kebijakan, alternatif kebijakan dan rekomendasi kebijakan dalam mempengaruhi perkembangan kurikulum pendidikan serta membantu para pemangku kepentingan pendidikan dalam proses pengembangan kurikulum pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur atau penelitian kepustakaan. Hasil, Perumusan masalah kebijakan, alternatif kebijakan, dan rekomendasi kebijakan merupakan tiga elemen penting yang saling berkaitan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan kebijakan. Kebijakan publik dirinci sehingga mampu menemukan hal-hal mana saja yang penting dalam penentuan pengambilan keputusan. Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang berkaitan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Perumusan Masalah, Alternatif Kebijakan, Rekomendasi Kebijakan, Pengembangan Kurikulum

Abstract

The curriculum is a central element in the education system that plays an important role in determining the direction and goals of education. A quality and relevant curriculum is the key to producing young people who are competent and able to answer future challenges. In an ever-evolving global context, the dynamics of change and demands on education systems are increasingly complex. This encourages the need for continuous curriculum adjustment and development. Effective curriculum development cannot be done in isolation from education

How to cite:	Puji Ambarwati, Nanang Fathurrohman, Anis Fauzi (2024) I Perumusan Masalah Kebijakan, Alternatif Kebijakan, dan Rekomendasi Kebijakan dalam Mempengaruhi Perkembangan Kurikulum Pendidikan, (5) 5
E-ISSN:	2722-5356
Published by:	Ridwan Institute

Perumusan Masalah Kebijakan, Alternatif Kebijakan, dan Rekomendasi Kebijakan dalam Mempengaruhi Perkembangan Kurikulum Pendidikan

policy. The right education policy is the foundation for the formulation of a quality and future-oriented curriculum. This study aims to provide input and enrich understanding of the systematics of policy problem formulation, policy alternatives and policy recommendations in influencing the development of the educational curriculum and assisting education stakeholders in the process of developing an educational curriculum. This research is qualitative research using literature study methods or literature research. The formulation of policy problems, policy alternatives, and policy recommendations are three important elements that are interrelated and have a significant influence on policy making. Public policies are detailed so as to be able to find which things are important in making decisions. Education policy is a part of public policy that is closely related and influences each other.

Keywords: *Public Policy, Problem Formulation, Policy Alternative, Policy Recommendation, Curriculum Development*

Pendahuluan

Pendidikan memiliki fungsi yang strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang akan melaksanakan fungsi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya termasuk dalam perannya mengambil sebuah kebijakan (Fika, Fauzi, & Qurtubi, 2023);(Harun, 2019). Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan (Suriani & El Widdah, 2024). Itu sebabnya, suatu kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak dan mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum sudah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

Kebijakan dibuat sebagai aturan atau ketentuan tertulis dari keputusan formal lembaga atau organisasi yang sifatnya mengikat untuk mengatur perilaku seseorang guna mencapai tujuan, menciptakan tata nilai baru dalam institusi atau organisasi. Kebijakan juga menjadi referensi para anggota organisasi atau institusi dalam berperilaku (Suherni, Qurtubi, & Fauzi, 2023). Menurut Hidayat (2022) dan Nugroho (2014) kebijakan Publik (Public Policy) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik merupakan suatu program atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam masyarakat (Rizqya, 2022). Perumusan masalah kebijakan merupakan langkah awal yang krusial dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini karena rumusan masalah yang tepat akan menentukan arah dan fokus kebijakan yang akan dibuat. Setelah masalah kebijakan dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mencari alternatif kebijakan yang mungkin dapat menyelesaikan masalah tersebut. Alternatif kebijakan ini haruslah feasible, efektif, dan efisien.

Penelitian terdahulu oleh Maimunah (2020) Penelitian ini menjelaskan tentang hakikat dan sejarah kebijakan pendidikan Islam publik dimana Kementerian Agama RI sebagai pemegang kebijakan dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pelaksana atau yang terimplikasi dari kebijakan. Mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis. Terutama ingin menjawab persoalan tentang mengapa disetiap kementerian memiliki lembaga pendidikan, padahal sudah ada kementerian pendidikan nasional yang mengatur pendidikan di Indonesia, sehingga ada anggapan bahwa adanya ketidakpercayaan dengan kementerian pendidikan nasional selaku penyelenggara pendidikan.

Berdasarkan analisis terhadap alternatif kebijakan, selanjutnya dapat dibuat rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan ini berisi tentang pilihan alternatif kebijakan yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik dibuat untuk menentukan tujuan dan arah kurikulum, konten dan metode pembelajaran serta mengevaluasi dan memperbaharui kurikulum untuk tercapainya pendidikan yang berkualitas, relevan dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan, serta untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien pada pengembangan kurikulum di dalam kebijakan pendidikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah atau referensi lainnya serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Istilah kebijakan (policy) seringkali diterjemahkan dengan politik, aturan, program, keputusan, undang-undang, peraturan, ketentuan, kesepakatan, konvensi dan rencana strategis. Kebijakan itu lahir setelah dilakukan analisis lapangan mengenai kebutuhan di masyarakat yang disebut dengan istilah perumusan masalah. Adapun perumusan masalah kebijakan dapat dilihat dari pengindentifikasian masalah dan agenda penyusunan skala prioritas, perumusan (formulasi) rancangan kebijakan, penetapan dan pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan (Supiana & Zaqiah, 2021)

Di dalam menentukan sebuah kebijakan juga perlu memperhatikan tata urutan perundangan yang berlaku dengan urutan sebagai berikut: 1) UUD 1945. 2) Ketetapan MPR. 3) Undang-undang. 4) Perpu. 5) Peraturan Pemerintah. 6) Keputusan Presiden. 7) Peraturan Daerah. Dalam memenuhi ketentuan tata urutan perundangan tersebut maka perlu ditekankan bahwa semua pihak harus dilindungi haknya, efektivitas perundangan

berlainan. Kelengkapan perundangan tidak menjamin kualitas kebijakan yang baik, pelaksanaan peraturan jauh lebih penting daripada ratifikasinya (Andhika, 2019).

Kebijakan dapat dibedakan menjadi kebijakan publik dan kebijakan privat. Kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintah yang legitimate untuk mendorong, menghambat, melarang atau mengatur tindakan private (individu atau lembaga swasta). Kebijakan privat adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga swasta dan tidak bersifat memaksa kepada orang atau lembaga lain. Misalnya, keputusan suatu perusahaan swasta untuk menetapkan harga jual produk yang dihasilkannya merupakan contoh kebijakan privat. Perusahaan swasta adalah lembaga privat dan keputusannya tidak mengikat atau bersifat memaksa bagi perusahaan lain atau masyarakat luas. Kebijakan privat hanya berlaku internal, bagi lembaga atau individu itu saja (Mulyasa, 2022). Perumusan kebijakan dalam praktiknya akan melibatkan berbagai aktor, baik yang berasal dari aktor negara maupun aktor non negara.

A. Perumusan Masalah Kebijakan

Perumusan masalah kebijakan adalah tahap awal dalam proses pembuatan kebijakan. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi, analisis, dan definisi masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau organisasi. Perlu diingat pula bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi (Muadi, Ismail, & Sofwani, 2016). Perumusan kebijakan memiliki banyak model. Salah satu model ideal yang banyak dirujuk oleh para pakar dan praktisi adalah model rasional dari Patton, Sawicki, dan Clark (Nugroho, 2020).

Tujuan Perumusan Masalah Kebijakan: 1) Memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tepat sasaran dan efektif dalam menyelesaikan masalah. 2) Membantu pembuat kebijakan untuk memahami akar permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3) Memperjelas tujuan dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai. 4) Memudahkan proses pengambilan keputusan dan penyusunan program.

Langkah-langkah dalam Perumusan Masalah Kebijakan: 1) Identifikasi masalah: Mencari tahu dan mengumpulkan informasi tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau organisasi. 2) Analisis masalah: Meneliti dan memahami akar permasalahan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan konsekuensinya. 3) Definisi masalah: Merumuskan masalah secara jelas dan ringkas, sehingga mudah dipahami dan ditindaklanjuti.

Karakteristik Perumusan Masalah Kebijakan yang baik: 1) Jelas: Masalah yang dirumuskan harus mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. 2) Spesifik: Masalah yang dirumuskan harus spesifik dan tidak ambigu. 3) Akurat: Masalah yang dirumuskan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat. 4) Relevan: Masalah yang dirumuskan harus relevan dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai. 5) Bermanfaat: Masalah yang dirumuskan harus bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti dengan solusi yang tepat.

B. Alternatif Kebijakan

Alternatif kebijakan adalah berbagai pilihan solusi yang diajukan untuk mengatasi suatu masalah kebijakan. Pada tahap ini, dilakukan eksplorasi dan analisis berbagai pilihan kebijakan yang mungkin dapat menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan konsekuensi dan manfaatnya. Tujuan Alternatif Kebijakan: 1) Menyediakan berbagai pilihan solusi kepada pembuat kebijakan untuk dipilih. 2) Membantu pembuat kebijakan untuk memilih solusi yang paling efektif dan efisien. 3) Memperjelas konsekuensi dan manfaat dari setiap pilihan kebijakan. 4) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan.

Jenis-jenis Alternatif Kebijakan: 1) Kebijakan baru: Merumuskan dan menerapkan kebijakan baru untuk mengatasi masalah. 2) Perubahan kebijakan: Mengubah atau memodifikasi kebijakan yang sudah ada. 3) Pencabutan kebijakan: Menghapus atau mencabut kebijakan yang sudah ada. 4) Kombinasi kebijakan: Kombinasi dari beberapa jenis kebijakan di atas.

Langkah-langkah dalam Menganalisis Alternatif Kebijakan: 1) Identifikasi alternatif kebijakan: Mencari tahu dan mengumpulkan informasi tentang berbagai pilihan solusi yang mungkin dapat menyelesaikan masalah. 2) Analisis alternatif kebijakan: Meneliti dan memahami konsekuensi dan manfaat dari setiap pilihan kebijakan, termasuk dampaknya terhadap ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. 3) Evaluasi alternatif kebijakan: Membandingkan dan memilih alternatif kebijakan yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah.

C. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan adalah saran-saran yang diajukan kepada pembuat kebijakan untuk menyelesaikan suatu masalah (Rizqya, 2022). Rekomendasi ini didasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap suatu masalah. Tujuan Rekomendasi Kebijakan: 1) Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam memilih solusi yang tepat. 2) Membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang efektif. 3) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan. 4) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Jenis-jenis Rekomendasi Kebijakan: 1) Rekomendasi umum: Memberikan saran-saran umum tentang solusi yang mungkin dapat menyelesaikan masalah. 2) Rekomendasi spesifik: Memberikan saran-saran yang spesifik dan terukur tentang solusi yang mungkin dapat menyelesaikan masalah. 3) Rekomendasi jangka pendek: Memberikan saran-saran tentang solusi yang dapat diterapkan dalam jangka pendek. 4) Rekomendasi jangka panjang: Memberikan saran-saran tentang solusi yang dapat diterapkan dalam jangka panjang.

Langkah-langkah dalam Menyusun Rekomendasi Kebijakan: 1) Identifikasi masalah: Mencari tahu dan memahami akar permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 2) Analisis masalah: Meneliti dan memahami konsekuensi dan manfaat dari berbagai pilihan solusi. 3) Evaluasi alternatif kebijakan: Membandingkan dan memilih alternatif kebijakan yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah. 4) Rumuskan rekomendasi kebijakan: Menyusun

Perumusan Masalah Kebijakan, Alternatif Kebijakan, dan Rekomendasi Kebijakan dalam Mempengaruhi Perkembangan Kurikulum Pendidikan

rekomendasi kebijakan yang jelas, spesifik, dan terukur. 5) Komunikasikan rekomendasi kebijakan: Menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pembuat kebijakan dan masyarakat.

Karakteristik Rekomendasi Kebijakan yang Baik: 1) Relevan: Rekomendasi kebijakan harus relevan dengan masalah yang dihadapi. 2) Efektif: Rekomendasi kebijakan harus mampu menyelesaikan masalah secara efektif. 3) Efisien: Rekomendasi kebijakan harus dapat menyelesaikan masalah dengan biaya yang minimal. 4) Berkelanjutan: Rekomendasi kebijakan harus dapat diterapkan dalam jangka panjang. 5) Adil: Rekomendasi kebijakan harus adil dan tidak merugikan kelompok tertentu. 6) Dapat diterima: Rekomendasi kebijakan harus dapat diterima oleh masyarakat.

D. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan dalam pendidikan dibuat berdasarkan tahapan yang sama halnya dengan pengambilan kebijakan publik (Suherni et al., 2023);(Syafiq, 2016). Perumusan masalah kebijakan, alternatif kebijakan dan rekomendasi kebijakan dilaksanakan berdasarkan berbagai pertimbangan sesuai dengan segala permasalahan yang ada di lapangan. Kebijakan publik diputuskan untuk kesejahteraan rakyat, maka kebijakan pendidikan juga diputuskan untuk membangun generasi muda yang berkualitas sehingga terjadi peningkatan pencapaian kesejahteraan bangsa.

Dalam kebijakan pendidikan ada tiga faktor yang secara langsung berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum yang berdampak langsung pada kualitas proses belajar mengajar, yaitu hardware yang terdiri atas sarana dan prasarana, humanware yang terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan, dan software yang terdiri atas metode mengajar (Pranata, 2018). Maka secara sinergi ketiga hal tersebut menuntut adanya kebijakan publik untuk memenuhi ketiga faktor yang akan mempengaruhi pengembangan kurikulum secara berkesinambungan mengikuti perkembangan jaman. Misalnya, dalam era digital sekarang ini dituntut adanya kebijakan dari pemerintah untuk memenuhi fasilitas laptop dan internet dalam pengembangan kurikulum berbasis digital dan menambah jumlah anggaran pendidikan agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju.

Kesimpulan

Perumusan masalah kebijakan, alternatif kebijakan, dan rekomendasi kebijakan merupakan tiga elemen penting yang saling berkaitan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan kebijakan. Kebijakan publik dirinci sehingga mampu menemukan hal-hal mana saja yang penting dalam penentuan pengambilan keputusan. Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang berkaitan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Di dalam menentukan kebijakan publik, maka perlu dipertimbangkan kebijakan dalam pendidikan agar dapat menghasilkan formula terciptanya pengembangan kurikulum yang dapat mencerdaskan bangsa dan terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat. Maka diharapkan kepada para pemangku kebijakan baik di pusat maupun tingkat daerah untuk lebih cermat dalam melakukan perumusan

masalah kebijakan, alternatif kebijakan, dan rekomendasi kebijakan dalam pengambilan kebijakan publik karena hal tersebut akan mempengaruhi kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan pada akhirnya akan mempengaruhi pengembangan kurikulum sebagai wahana untuk mencerdaskan bangsa.

BIBLIOGRAFI

- Andhika, Lesmana Rian. (2019). Model sistem dinamis: Simulasi formulasi kebijakan publik [Dynamic system model: Simulation method in formulation public policy]. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 73–86.
- Fika, Nurul, Fauzi, Anis, & Qurtubi, Ahmad. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. *Journal on Education*, 5(4), 16737–16747.
- Harun, Harun. (2019). *Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Pendidikan Berbasis Multikultural Di Smk Negeri 3 Seluma*. IAIN BENGKULU.
- Hidayat, Agus Rohmat, & Hardiyanto, Feri. (2022). Lembaga Keuangan dan Kebijakan Publik Dalam Menangani Krisis Ekonomi Global. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(10), 17710–17719.
- Maimunah, Maimunah, & Rosadi, Kemas Imron. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Kebijakan Politik Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 249–265.
- Muadi, Sholih, Ismail, M. H., & Sofwani, Ahmad. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Mulyasa, H. E. (2022). *Manajemen pendidikan karakter*. Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. (2014). Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. *Jakarta: PT Elex Media Komputindo*.
- Nugroho, Riant. (2020). *Perumusan Kebijakan Dalam Praktek*. Rumah Reformasi Kebijakan [Institute for Policy Reform].
- Pranata, Handy. (2018). Pengaruh Pendidikan, Upah, Usia, Dan Masa Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (Studi Kasus pada Unit Industri Rokok Cerutu Bobbin Kabupaten Jember). *Energies*, 6(1).
- Rizqya, Safira Nur. (2022). Dampak Kebijakan Publik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Saat Krisis Pandemi COVID-19. *Jurnal Politique*, 2(1), 13–26.
- Suherni, Eneng Siti, Qurtubi, Ahmad, & Fauzi, Anis. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan, Sertifikasi Guru dan Dosen (Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2005). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 4897–4903.
- Supiana, Supiana, & Zaqiah, Qiqi Yuliati. (2021). Perumusan Masalah Kebijakan. *Ad-Man-Pend: Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan*, 4(1), 25–43.
- Suriani, Nidia, & El Widdah, Minnah. (2024). Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Islam. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 33–41.
- Syafiq, Athfin Risqi. (2016). Implementasi Kebijakan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) di SMK Negeri 1 Trucuk Klaten. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 5(5), 514–525.

Copyright holder:

Puji Ambarwati, Nanang Fathurrohman, Anis Fauzi (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

